



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TIMUR

Surabaya, 6 Mei 1983

Nomor : 050.41/ *8387* /011/1983  
Lampiran : 1 ( satu )  
Perihal : Penerimaan sumbangan  
Gedung Perpustakaan  
Umum Pamekasan menya-  
lahi peraturan

Kepada  
Yth. Sdr. Bupati Kepala Daerah  
Tingkat II Pamekasan  
di  
PAMEKASAN

Bersama ini disampaikan dengan hormat foto copy guntingan su-  
rat kabar memorandum tanggal 21 April 1983 perihal tersebut pada  
pokok surat dengan pengharapan agar Saudara menyampaikan laporan me-  
ngeni duduk persoalan yang sebenarnya serta langkah-langkah penye-  
lesaian yang telah/akan Saudara laksanakan.

Demikian untuk dimaklumi dan kami mengharapkan laporan Sau-  
dara disampaikan kepada kami dalam waktu dekat.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TIMUR  
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah  
u.b.

Kepala Biro Bina Pemerintahan



*[Handwritten Signature]*

NY. MOERKILAH Mwk  
NIP 010015745

TEMBUSAN :  
Yth. Sdr. Pembantu Gubernur  
di Pamekasan.



PEMERINTAH KABUPATEN JAWA TIMUR  
KANTOR SURAT KADAR

TANGGAL : 21 April 1983.

NOMOR : 572.1/I/EPRI/1983.

**Memorandum**

Kamis, 21 April 1983

**Penerimaan sumbangan  
GPU Pamekasan  
menyalahi peraturan**

**PAMEKASAN, MEMO**

Gedung Perpustakaan Umum yang penggunaannya telah diresmikan oleh ex Bupati Moch. Toha pada tgl. 5-4-83 lalu, menimbulkan persoalan dalam DPRD Tk. II Pamekasan. Menurut peraturan Mendagri 8/1978 dalam menerima sumbangan tersebut...

...pun dari masyarakat umum dengan persetujuan DPRD. Kalau sebuah gedung, maka persetujuan itu harus dimintakan sebelum dibangun, demikian pendapat sementara anggota DPRD Tk. II Pamekasan.

Sedangkan gedung Perpustakaan Umum tersebut yang mulai dibangun No. pember 1982 permintaan persetujuannya baru diterima oleh DPRD pada saat gedung itu sudah rampung

dan malah sudah akan diresmikan Surat Bupati ini bernomor 030/293/471.41/1983 tgl. 25-3-83 diterima DPRD bersamaan dengan surat undangan untuk menghadiri peresmian pemakaiannya tgl. 2 April 1983.

Sementara ini pihak legislatif mengambil sikap tidak akan membalas surat permintaan persetujuan itu dan persoalannya akan dijadikan pembahasan dalam sidang pleno, karena ada penyimpangan dalam prosedur.

Gedung tersebut merupakan sumbangan masyarakat untuk Pemda dan biaya pembangunan sebesar Rp 21.000.000,00 sepenuhnya dari para pemborong dan usahawan. (ANA) 1